



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAJAR LAKSONO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA DALAM NEGERI
3. NHK : 153182

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.080.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m²/160 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.080.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 139.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. LAINNYA, PACIFIC SEPEDA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. LAINNYA, FEDERAL SEPEDA Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
5. MOTOR, YAMAHA RX KING Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
6. LAINNYA, PACIFIC SEPEDA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
7. LAINNYA, PACIFIC SEPEDA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 115.096.510

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	1.334.096.510
III. HUTANG	Rp.	267.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.067.096.510

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.